

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Adang, Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Ali Ahmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Arifin Arief, 2001, *Hutan & Kehutanan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Asikin Zainal dan Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press.
- Asshiddiqie Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Atsasmita 2009, *Romli, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Efendy Marwan, 2005, *Kejaksaan R.I Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman, M. Lawrence, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Rusell Sage Fundation, New York.
- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Harahap Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penyelidikan*, Ed. 2, Jakarta : Sinar Grafika
- Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kels Mac Iver, 1967, *The Web of Government*, The Macmillan Company, New York.



- Mahfud MD, Moh. 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers Cetakan pertama.
- Mahfud, MD. Moh, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: LP3ES.
- Mahmuji Sri dkk, 2005, *Metode penelitian dan penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas hukum UI.
- Manan Mahfud, 2010, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Pusat Diklat dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2004, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni*, Bandung.
- Mulyadi Lilik 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Almuni, Bandung.
- Nasution Mirza, 2005, *Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Pusantara.
- Peter Muhamad Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Jakarta: Prenada Medi.
- Ridwan, HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada.
- Salman, Otje & Susanto, Anton F., 2004, *Teori Hukum: Mengingat, Mengupilkan dan Membuka Kembali*, Cet. Pertama, Bandung: Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *sisi lain dari hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Selznick Philip dan Philipe Nonet, 2009, *Toward Responsive Law, USA: Law & Society In Transition*.
- Sudarto, 1977, *Capita Seleкта Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.



Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma.

Surachman, Andi Hamzah, Pre-Trial Justice Discretionary Justice dalam KUHAP berbagai Negara, Jakarta: Sinar Grafik, 2015, hlm74

Surachman, Andi Hamzah, 1996, Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya, Jakarta: Sinar Grfika.

Suriasumantri Jujun S., 1999, Filsafat ilmu, sebuah Pengantar Populer Jakarta:Pustaka *Sinar* Harapan.

Susanto, Anthon Freddy, 2005, Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna, Bandung: Refika Aditama.

Syaukani Imam, 2004, Ahsin Thhohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta:PT. Grafindo Persada.

Wisnubroto, 1997, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

## **B. Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Undang-Undang No. 15 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia



### **C. Jurnal, Karya Ilmiah, Internet**

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2008,

Mardjono Reksodiputro, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia", makalah, Kuliah Umum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 24 April 2010

Koalisi Anti Mafia Hutan, Public Review Terhadap Rancangan Undang Undang Tentang Pemberantasan Perusakan Hutan, Jakarta 2013

WWF, Kehutanan, <http://www.wwf.or.id>, [11 Oktober 2016]

Pembahasan RUU Pencegahan, Perusakan Hutan Deadlock, BP3H Perlu Terobosan, <http://infopublik.id> [24 oktober 2016]

Gede Putera Perbawa,"Kebijakan Hukum pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Prspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum", Arena hukum, diakses melalui <http://arenahukum.ub.ac.id>, diakses pada tanggal 12 November.

*Guidelines on the Role of Prosecutors, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 189 (1990).*